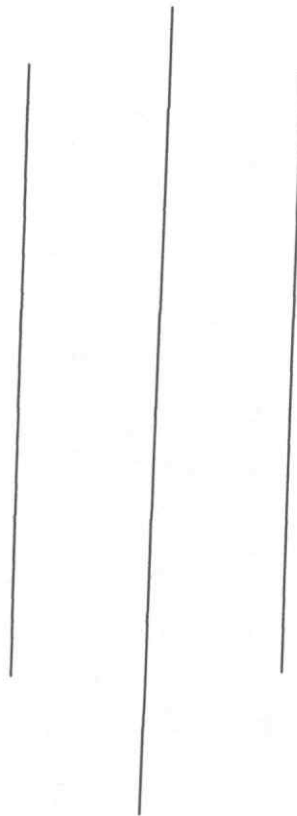




LAPORAN KEUANGAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

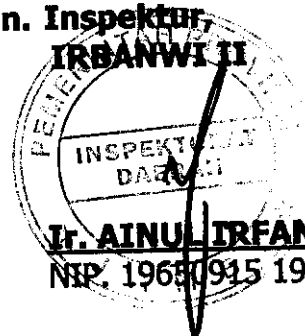
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan, sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam usaha mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Jambi, Februari 2021

a.n. Inspektur,

IRBANWI II



Ir. AINUL IRFAN.MTP

NIP. 19680915 199303 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Laporan Realisasi Anggaran	1
Neraca	2
Laporan Operasional	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR	
PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	10
2.1. Ekonomi Makro	10
2.2. Kebijakan Keuangan.....	10
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar.....	14
4.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	15
4.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya	15
4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	15
4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja	16
4.6. Kebijakan Akuntansi Beban	16

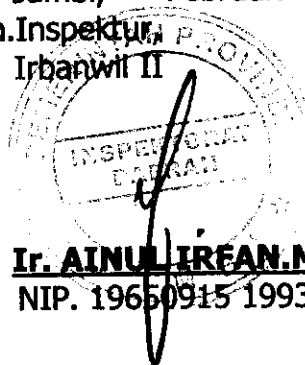
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	17
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca	21
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	25
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
BAB VI PENUTUP	28

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Februari 2021
a.n. Inspektur,
Irbanwil II



Ir. AINUL IREAN.MTP
NIP. 19650915 199303 1 005



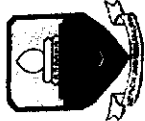
NERACA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Unit Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah Provinsi Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah Provinsi		
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	541.600,00	1.295.600,00
	541.600,00	1.295.600,00
JUMLAH ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen		
	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.458.990.224,90	7.162.547.024,90
Gedung dan Bangunan	3.327.112.552,00	2.969.031.552,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.970.000,00	19.970.000,00
Aset Tetap Lainnya	23.815.909,00	23.815.909,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(8.996.763.008,29)	(8.648.736.528,69)
	1.833.125.677,61	1.526.627.957,21
JUMLAH ASET TETAP		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi			
URAIAN		2020	2019
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		792.796.690,40	792.796.690,40
Akumulasi Amortisasi		0,00	0,00
akumulasi penyusutan aset lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		792.796.690,40	792.796.690,40
JUMLAH ASET		2.626.463.968,01	2.320.720.247,61
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Beban		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kepada pihak ketiga		0,00	0,00
Utang Belanja		15.437.250,00	15.412.420,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		15.437.250,00	15.412.420,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		15.437.250,00	15.412.420,00
EKUITAS			
EKUITAS		2.611.026.718,01	2.305.307.827,61
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.626.463.968,01	2.320.720.247,61



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4.02		Pengawasan			
Unit Organisasi : 4.02.01		Inspektorat Daerah Provinsi			
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01		Inspektorat Daerah Provinsi			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	27.486.683.958,34	25.759.879.124,00	93,72	25.295.445.487,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.388.638.708,34	24.688.654.924,00	93,56	24.241.686.990,00
5.1.1	Belanja Pegawai	13.706.853.118,54	13.140.222.607,00	95,87	12.962.657.581,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.681.785.589,80	11.548.432.317,00	91,06	11.279.029.402,00
5.2	BELANJA MODAL	1.098.045.250,00	1.071.224.200,00	97,56	1.053.758.497,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.316.000,00	713.143.200,00	96,46	809.425.497,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.729.250,00	358.081.000,00	99,82	244.333.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(27.486.683.958,34)	(25.759.879.124,00)	93,72	(25.295.445.487,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(27.486.683.958,34)	(25.759.879.124,00)	93,72	(25.295.445.487,00)

Jambi, 31 Desember 2020

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



Ferdiansyah S.STP/MA

NIP. 19800701.199912.1.001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Bidang Pemerintahan : 4.02		Pengawasan	
Unit Organisasi : 4.02.01		Inspektorat Daerah Provinsi	
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01		Inspektorat Daerah Provinsi	

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	25.037.460.233,60	24.897.556.194,76	139.904.038,84	0,56
9.1.1	Beban Pegawai - LO	13.140.222.607,00	12.962.657.588,00	177.565.019,00	1,37
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	11.549.211.147,00	11.280.703.695,00	268.507.452,00	2,38
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	348.026.479,60	625.102.311,76	(277.075.832,16)	(44,32)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	29.092.600,00	(29.092.600,00)	(100,00)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4.02 Pengawasan Unit Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah Provinsi Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah Provinsi					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(25.037.460.233,60)	(24.897.556.194,76)	(139.904.038,84)	0,56
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1 8.4.2 8.4.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(25.037.460.233,60)	(24.897.556.194,76)	(139.904.038,84)	0,56
POS LUAR BIASA					
8.5.1 9.4.1	Pendapatan Luar Biasa - LO Beban Luar Biasa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(25.037.460.233,60)	(24.897.556.194,76)	(139.904.038,84)	0,56

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4.02	
Unit Organisasi	: 4.02.01	
Sub Unit Organisasi	: 4.02.01.01	
		Pengawasan
		Inspektorat Daerah Provinsi
		Inspektorat Daerah Provinsi

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
----------	--------	---------------	---------------	--------------------------	-----

Jambi, 31 Desember 2020

PIL PENGGUNA ANGGARAN

Ferdiansyah, S.STP,MA

NIP. 19800701 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4.02	Pengawasan
Unit Organisasi : 4.02.01	Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01	Inspektorat Daerah Provinsi

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	2.305.307.827,61	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(25.037.460.233,60)	(24.897.556.194,76)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	(416.700.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	25.759.879.124,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.611.026.718,01	(24.897.556.194,76)

Jambi, 31 Desember 2020

PIL. PENGGUNA ANGGARAN

Ferdiansyah, S.STP, MA

NIP. 19800701-199912-1-001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02	Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01	Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat Daerah Provinsi

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	2.305.307.827,61	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LG	(25.037.460.233,60)	(24.897.556.194,76)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBTJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	(416.700.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	25.759.879.124,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.611.026.718,01	(24.897.556.194,76)

Jambi, 1 Januari 2020

Pt. PENGGUNA ANGGARAN



Ferdiansyah, S.STP,MA

NIP. 19800701 199912 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan memuat hal-hal yang penting antara lain:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan

anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi, Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB III. Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, dan
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat berkomitmen dengan visi "Terwujudnya aparaturnya pengawasan yang profesional dan

berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi TUNTAS 2021” didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Jabatan Fungsional.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2019 dan pada tahun 2020.

Kebijakan ekonomi makro Tahun 2020 ditekankan dalam rangka mengurangi dampak pelemahan ekonomi global akibat adanya pandemi virus Corona yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional dan berimbas ke daerah. Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan yang akan menjadi stimulus sekaligus untuk merespons perubahan situasi agar tidak menjadi lebih buruk.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2020 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan dengan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi Virus Corona yang terjadi selama Tahun 2019-2020.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inpektorat Daerah Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PELAKSANAAN	
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN	
					Rp.	%
Inspektorat Daerah Provinsi						
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.921.659.479,00	-204.988.200,00	2.716.671.279,00	2.451.382.039,00	90,23
1	Penyediaan jasa surat menyurat	15.414.180,00	0,00	15.414.180,00	7.601.500,00	49,31
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	281.137.170,00	0,00	281.137.170,00	188.436.640,00	67,03
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.066.000,00	0,00	8.066.000,00	7.438.800,00	92,22
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	342.746.600,00	-39.069.108,00	303.677.492,00	292.352.814,00	96,27
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	186.388.800,00	0,00	186.388.800,00	184.343.900,00	98,90
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	93.324.379,00	5.862.150,00	99.186.529,00	99.103.000,00	99,92
7	Penyediaan alat tulis kantor	78.216.000,00	13.822.000,00	92.038.000,00	92.033.600,00	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	151.672.900,00	-30.005.250,00	121.667.650,00	102.529.400,00	84,27
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	89.837.650,00	9.390.300,00	99.227.950,00	26.254.800,00	26,46
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.415.400,00	0,00	25.415.400,00	8.990.500,00	35,37
11	Penyediaan makanan dan minuman	160.000.000,00	-25.000.000,00	135.000.000,00	96.129.285,00	71,21
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.489.440.400,00	-139.988.292,00	1.349.452.108,00	1.346.167.800,00	99,76
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.165.416.524,00	-2.774.523.274,00	1.390.893.250,00	1.194.063.150,00	85,85
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.626.087.274,00	-1.457.732.274,00	168.355.000,00	158.898.200,00	94,38
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	92.550.000,00	83.250.000,00	175.800.000,00	36.450.000,00	20,73
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	89.000.000,00	0,00	89.000.000,00	58.557.950,00	65,80
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.116.758.250,00	-729.981.000,00	386.777.250,00	385.912.000,00	99,78
5	Pengadaan komputer	1.241.021.000,00	-670.060.000,00	570.961.000,00	554.245.000,00	97,07
3. Program peningkatan disiplin aparatur		203.613.150,00	-41.113.150,00	162.500.000,00	161.987.000,00	99,68
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	203.613.150,00	-41.113.150,00	162.500.000,00	161.987.000,00	99,68
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		10.517.954.513,80	-2.223.150.003,00	8.294.804.510,80	7.662.875.145,00	92,38
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	3.772.925.200,00	-174.888.000,00	3.598.037.200,00	3.572.496.850,00	99,29
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	248.581.600,00	-116.998.800,00	131.582.800,00	129.370.100,00	98,32
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	2.594.907.162,00	-240.654.375,00	2.354.252.787,00	1.960.724.532,00	83,28
4	Inventarisasi temuan pengawasan	61.606.400,00	-26.911.500,00	34.694.900,00	1.909.400,00	5,50
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	1.338.597.802,00	-694.445.650,00	644.152.152,00	625.612.900,00	97,12
6	Gelar Pengawasan dan rapat koordinasi daerah tahun 2019	996.618.611,80	-416.289.800,00	580.328.811,80	508.213.005,00	87,57
7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	206.869.124,00	-98.595.500,00	108.273.624,00	101.948.299,00	94,16

8	Sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)	1.038.401.000,00	-196.250.764,00	842.150.236,00	761.268.059,00	90,40
9	Survei Penilaian Integritas	125.255.000,00	-125.255.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	134.192.614,00	-132.860.614,00	1.332.000,00	1.332.000,00	100,00
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan		3.321.918.000,00	-2.246.448.200,00	1.075.469.800,00	1.026.313.383,00	95,43
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	2.689.396.000,00	-1.780.929.200,00	908.466.800,00	890.321.800,00	98,00

Halaman 1/2

2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	632.522.000,00	-465.519.000,00	167.003.000,00	135.991.583,00	81,43
7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		272.000.000,00	-132.508.000,00	139.492.000,00	123.035.800,00	88,20
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	272.000.000,00	-132.508.000,00	139.492.000,00	123.035.800,00	88,20
JUMLAH		21.402.561.666,80	-7.622.730.827,00	13.779.830.839,80	12.619.656.517,00	91,58

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 21.402.561.666,80 . karena pandemi covid 19 yang melanda terjadi Refocusing anggaran menjadi Rp. 13.779.830.839,80. Realisasi keuangan sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp. 12.619.656.517,00 atau tercapai 91,58% anggaran yang tidak terserap sebesar 8,42 % merupakan efisiensi pelaksanaan kegiatan di masa Pandemi covid di tahun 2020.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

b. Persediaan

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo

akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Pos Aset Lainnya pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Pos Kewajiban pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

3.6. Kebijakan Akuntansi Beban

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2020 Sebesar Rp 36.113.345.773,25 karena adanya pandemi Covid 19 maka mengalami Recofusing dan Anggaran dikurangi menjadi sebesar Rp 27.486.683.958,34 rincian Pagu Pendapatan dan Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
PENDAPATAN	0,00	0,00
Total Pendapatan	0,00	0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.710.784.106,45	13.706.853.118,54
Belanja Pegawai	14.710.784.106,45	13.706.853.118,54
BELANJA LANGSUNG	21.402.561.666,80	13.779.830.839,80
Belanja Pegawai	856.780.800	738.708.800,00
Belanja Barang dan Jasa	16.792.252.572,80	11.943.076.789,80
Belanja Modal	3.753.528.294,00	358.729.250,00
Total Belanja	36.113.345.773,25	27.486.683.958,34

4.1.1. Pendapatan LRA

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.1.2. Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan di Inspektorat Provinsi Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 sebesar Rp 27.486.683.958,34 telah direalisasikan sebesar Rp 25.759.879.124,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
5	BELANJA	27.486.683.958,34	25.759.879.124,00	93,72
5.1	Belanja Operasi	26.388.638.708.34	24.688.654.924,00	93,56
5.1.1	Belanja Pegawai	13.706.853.118.54	13.140.222.607,00	95,87

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.681.785.589,80	11.548.432.317,00	91,06
5.2	Belanja Modal	1.098.045.250,00	1.071.224.200,00	97,56
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.316.000,00	713.143.200,00	96,46
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.729.250,00	358.081.000,00	99,82
JUMLAH		27.486.683.958,34	25.759.879.124,00	93,72

Realisasi Belanja tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 464.433.637,00 di bandingkan tahun anggaran 2019 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2019 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Rp
	TA 2020	TA 2019	
BELANJA OPERASI	24.688.654.924,00	24.241.686.990,00	446.967.934,00
Belanja Pegawai	13.140.222.607,00	12.962.657.588,00	177.565.019,00
Belanja Barang dan Jasa	11.548.432.317,00	11.279.029.402,00	269.402.915,00
BELANJA MODAL	1.071.224.200,00	1.053.758.497,00	17.465.703,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	713.143.200,00	809.425.497,00	(96.282.297,00)
Belanja Gedung dan Bangunan	358.081.000,00	244.333.000,00	113.748.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	25.759.879.124,00	25.295.445.487,00	464.433.637,00

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahpusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	13.706.853.118.54	13.140.222.607,00	95,87
Jumlah	13.706.853.118.54	13.140.222.607,00	95,87

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 13.140.222.607,00. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 177.565.019,00 atau 1,37%, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pegawai pada tahun yang berjalan. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2020	TA 2019	Rp	%
Belanja Pegawai	13.140.222.607,00	12.962.657.588,00	177.565.019,00	1,37
Jumlah	13.140.222.607,00	12.962.657.588,00	177.565.019,00	1,37

b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	12.681.785.589,80	11.548.432.317,00	91,06

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 12.681.785.589,80 dan Realisasi Rp 11.548.432.317. Kenaikan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 269.402.915,00 atau 2.39 %. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2020	TA 2019	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa	11.548.432.317,00	11.279.029.402,00	269.402.915,00	2.39

4.1.2.2. Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.316.000,00	713.143.200,00	96,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.729.250,00	358.081.000,00	99,82

Jumlah	1.098.045.250,00	1.071.224.200,00	97,56
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Anggaran dan Realisasi tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 1.098.045.250,00 dan Rp.1.071.224.200,00 Kenaikan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 17.465.703,00 atau 1,65 %. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2020 dan 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2020	TA 2019	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	713.143.200,00	809.425.497,00	(96.282.297,00)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.081.000,00	244.333.000,00	113.748.000,00	
Jumlah	1.071.224.200,00	1.053.758.497,00	17.465.703,00	1,65

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel sebagai berikut:

NO	Uraian	Merek/Jenis	Jumlah	Harga
1	Laptop	Deli / Vestro 3490	30 Unit	454.500.000
2	Ipad	Apple gen 7 128 GB	7 Unit	66.745.000
3	Note BOOK Lenovo	Lenovo V 330	1 Unit	20.000.000
4	Monitor	Lenovo Aio	1 Unit	13.000.000
5	Penghamcur Kertas	Secure Maxi 24 Strip	2 Unit	5.732.200
6	AC	Shap	3 Unit	13.188.000
7	TV	Shap	1 Unit	2.430.000
8	Kursi dan Meja Tamu	-	6 Unit	104.940.000
9	Meteran Digital	-	20 Unit	32.608.000
	JUMLAH		71 Unit	713.143.200,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

NO	URAIAN	HARGA
1	Rehap Selasar Kantor+Parit	84.518.000
2	Rehap Gedung rehap lantai granit 2 ruangan	175.129.000
3	Rehap Ruangan,Rehap WC	98.434.000
	JUMLAH	358.081.000,00

4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

4.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 541.600 dan Rp 1.295.600,00. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lancar: Persediaan	541.600,00	1.295.600,00
Jumlah	541.600,00	1.295.600,00

4.2.1.1. Persediaan

Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Nilai persediaan Tahun 2020 sebesar Rp. 541.600,- yang merupakan persediaan atas Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan. Rincian persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	ATK	278.100,00	1.032.100,00
2	Barang Cetak	-	-
3	Alat Listrik	-	-
4	Alat Kebersihan	263.500,00	263.500,00
	Jumlah	541.600,00	1.295.600,00

4.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.833.125.677,61 dan Rp. 1.526.627.957,21. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Perlengkapan dan mesin mengalami penambahan sebesar Rp.

715.743.200,- dan mengalami pengurangan akibat mutasi mobil Hi Ace ke Biro Umum sebesar Rp. 419.300.000,-. Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan mengalami penambahan sebesar Rp. 358.081.000,- yang merupakan rehab gedung/bangunan kantor, sedangkan jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya tidak mengalami perubahan. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.458.990.224,90	7.162.547.024,90
2	Gedung dan Bangunan	3.327.112.552,00	2.969.031.552,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.970.000,00	19.970.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	23.815.909,00	23.815.909,00
Nilai Perolehan		10.829.888.685,90	10.175.364.485,90
Akumulasi Penyusutan		(8.996.763.008,29)	(8.648.736.528,69)
Jumlah Aset Tetap		1.833.125.677,61	1.526.627.957,21

4.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.458.990.224,92 dan tahun 2019 sebesar Rp 7.162.547.024,92. Terdapat peningkatan sebesar Rp. 296.443.200,02. Penambahan nilai perolehan dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 713.143.200,00, mutasi tambah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebesar Rp. 2.600.000,00 dan mutasi kurang ke Biro Umum Setda Provinsi Jambi sebesar Rp. 419.300.000. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.996.763.008,29 sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu Rp. 2.625.922.368,03. Adapun rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7.162.547.024,90
Mutasi:	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	713.143.200,00
Mutasi tambah dari dinas kesehatan	2.600.000,00
Mutasi kurang ke Biro Umum	419.300.000,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7.458.990.224,92
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	8.996.763.008,29
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.625.922.368,03

4.2.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.327.112.552,00 dan 2.969.031.552,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.297.270.766,31. sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 1.029.841.785,70.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	2.969.031.552,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.081.000,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3.327.112.552,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	2.297.270.766,31
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1.029.841.785,70

4.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 19.970.000,00 dan tidak mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.989.500,00 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 12.980.500,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	19.970.000,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	6.989.500,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	12.980.500,00

4.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 23.815.909,00 dan dan tidak mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Aset Tetap Lainnya merupakan koleksi buku perpustakaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

4.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp 8.648.736.528,69, terdapat penambahan beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp.

640.976.479,60,- sehingga Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 8.996.763.008,29. Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain. Rincian akumulasi penyusutan Tahun 2020 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.899.706.051,58
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.297.270.766,31
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.989.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	726.346.690,40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	8.996.763.008,29

4.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 792.796.690,40. Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	792.796.690,40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	792.796.690,40
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0,00

4.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 15.437.000,00 dan Rp 15.412.420,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan. Berikut beban jangka pendek Tahun 2020 dan 2019 :

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Belanja Air	2.859.600,00	585.500,00
2	Belanja Telepon	785.300,00	753.300,00
3	Belanja Listrik	10.778.904,00	13.149.960,00
4	Belanja Telepon	1.013.446,00	923.660,00
	JUMLAH	15.437.000,00	15.412.420,00

4.2.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.611.026.718,01 dan Rp 2.305.307.827,61 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.3.2. Beban

Jumlah Beban tahun 2020 dan 2019 masing-masing Rp 25.037.460.233,60 dan Rp 24.897.556.194,76 Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2020	2019	Jumlah	%
Beban Pegawai-LO	13.140.222.607,00	12.962.657.588,00	177.565.019	1.37
Beban Barang dan Jasa	11.549.211.147,00	11.280.703.695,00	265.507.452	2.38
Beban Penyusutan	348.026.479,60	625.102.311,76	(277.075.832.16)	(44.32)
Beban Lain-lain	0	29.092.600,00	(29.092.600,00)	(100.)
Jumlah	25.037.460.233,60	24.897.556.194,76	139.904.038,84	0,56

4.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 13.140.222.607,00, dan Rp 12.962.657.588,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

4.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 11.549.211.147,00 dan Rp 11.280.703.695,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2020	2019	Jumlah	%
Beban Barang dan Jasa	11.549.211.147,00	11.280.703.695,00	268.507.452,00	2,38

4.3.2.3. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2020 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 286.552.968,30 dan Rp 534.025.308,04. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Realisasi	
	2020	2019
Beban Penyusutan	348.026.479,60	625.102.311,76

4.3.3. Surplus/Defisit-LO

Defisit tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 25.037.460.233,60 dan Rp 24.897.556.194,76. Jumlah per 31 Desember 2020 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp 139.904.038,84.

4.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp 2.305.307.827,61

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 25.037.460.233,60 dan Rp 24 897.556.194,76. Jumlah per 31 Desember 2020.

4.4.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2.611.026.718,01 dan Rp 2.305.307.827,61.

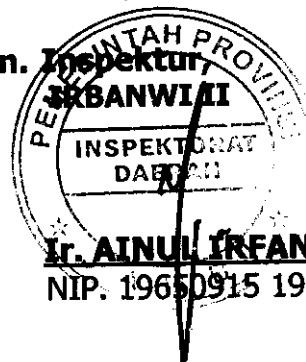
BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan handal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 secara keseluruhan.

Jambi, Februari 2021

a.n. Inspektur



Ir. AINUL IRFAN.MTP

NIP. 19650915 199303 1 005